

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Political will tercermin melalui penetapan program sebagai prioritas kebijakan daerah, penyediaan sumber daya yang memadai, penguatan koordinasi antarinstansi, dan konsistensi pemerintah dalam merespons berbagai tantangan implementasi kebijakan (Wijaya, 2023). *Political will* dimaknai sebagai dukungan dan komitmen nyata Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara efektif. Komitmen tersebut tercermin dari keseriusan pemerintah dalam menempatkan MBG sebagai agenda penting daerah, menyiapkan dukungan sumber daya yang dibutuhkan, memastikan keterlibatan para aktor pelaksana berjalan selaras, dan menjaga keberlanjutan program ketika menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Program MBG dilaksanakan secara nasional melalui tahapan bertahap, dengan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi-lokasi strategis sebagai pusat distribusi makanan bergizi. Implementasi serentak yang dimulai pada 6 Januari 2025 menandai peralihan program dari fase perencanaan menuju fase operasional di berbagai daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. Dinamika implementasi MBG di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 tidak terlepas dari konfigurasi politik pasca Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, yang menetapkan

pasangan Viman–Dicky secara resmi pada Januari 2025 dan membentuk basis legitimasi pemerintahan daerah (Nurhaeni, 2025). Kondisi tersebut merefleksikan bahwa implementasi MBG di tingkat daerah tidak hanya bergantung pada relasi pusat-daerah, tetapi juga pada konteks desentralisasi dan legitimasi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat daerah.¹

Penyelenggaraan program MBG di tingkat daerah memperoleh landasan tata kelola yang lebih jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (JDIH, 2025). Peraturan ini menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan melalui kerja sama multisektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, dengan menekankan aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan keamanan pangan, pengembangan kapasitas SPPG, pemantauan, evaluasi, hingga dukungan pendanaan program. Pemerintah daerah diberikan peran untuk mendukung penyelenggaraan MBG melalui penyediaan sarana dan prasarana, penguatan koordinasi perangkat daerah, pemantauan status gizi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), manajemen komunikasi kepada pemangku kepentingan, penyediaan data penerima manfaat, dan optimalisasi sumber daya pelaksana program.

¹ Kondisi yang menegaskan bahwa implementasi MBG tidak semata bersifat teknokratis, melainkan dipengaruhi oleh *political will* pemerintah daerah dalam kebijakan publik.

Keterkaitan politik antara Viman dengan Partai Gerindra sebagai partai pengusung pemerintahan nasional turut memperkuat asumsi bahwa implementasi Program MBG di Kota Tasikmalaya seharusnya memiliki dukungan politik yang kuat dan kemampuan implementasi yang lebih optimal, mengingat MBG merupakan program prioritas nasional pemerintahan Prabowo–Gibran. Program ini juga dapat dipahami sebagai kebijakan yang bersifat top-down, karena dirumuskan oleh pemerintah pusat dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga.

Di Kota Tasikmalaya, implementasi MBG dijalankan melalui pembentukan 111 SPPG berdasarkan data per 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, yang berfungsi sebagai unit teknis distribusi makanan bergizi. Daftar SPPG bersifat dinamis dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dalam memperluas jangkauan distribusi. Pada Kecamatan Tawang misalnya, terdapat beberapa unit pelaksana seperti SPPG Tawang Cikalang 2 yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 209, SPPG Tawang Cikalang 3 di Jalan Sutisna Senjaya No. 126, dan SPPG Tawang Kahuripan 7 di Jalan Cikalang No. 21 (BGN, 2024). Keberadaan beberapa SPPG menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki posisi strategis dalam implementasi MBG, baik dilihat dari jumlah sasaran penerima manfaat maupun kebutuhan distribusi yang relatif tinggi. Namun, banyaknya jumlah SPPG yang telah dibentuk tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi program di lapangan. Daftar SPPG di Kota Tasikmalaya

tersebut disajikan untuk menjadi dasar analisis terhadap variasi kondisi dan permasalahan implementasi MBG di tingkat daerah.

Fenomena permasalahan dalam implementasi Program MBG di Kota Tasikmalaya berkaitan dengan realitas implementasi yang melibatkan berbagai aspek, seperti aktor, unit pelaksana, kesiapan kelembagaan, kejelasan prosedur, distribusi, dan koordinasi yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh SPPG beroperasi secara optimal. Sejumlah SPPG mengalami kendala operasional dan koordinatif yang berdampak pada terhambatnya distribusi, munculnya persoalan keamanan pangan, dan ketidakpastian dalam mekanisme implementasi program.² Permasalahan tersebut tercermin dari beberapa kasus yang terjadi sepanjang tahun 2025, adapun rangkaian temuan permasalahan berdasarkan hasil dari wawancara pra-penelitian, memperlihatkan bahwa implementasi program MBG di Kota Tasikmalaya masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar yang berkaitan pada beberapa aspek dalam kebijakan.

Temuan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu menunjukkan masih terbatasnya pemahaman sebagian kader posyandu mengenai mekanisme dan ketentuan program. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses sosialisasi dan koordinasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada pelaksana di tingkat bawah belum berjalan optimal. Kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada munculnya kesalahpahaman dalam praktik, salah

² Kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi, yang menempatkan *political will* Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai faktor penting dalam memastikan konsistensi, pengendalian, dan keberlanjutan program MBG.

satunya terkait adanya pemberian sejumlah uang oleh penerima manfaat yang kemudian menimbulkan persepsi sebagai pungutan liar, meskipun secara prinsip MBG merupakan program yang diberikan secara gratis. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya terletak pada aspek teknis distribusi, tetapi juga pada kejelasan komunikasi kebijakan kepada aktor pelaksana.³

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan pengendalian implementasi program. Temuan lapangan menunjukkan adanya kendala distribusi makanan akibat perpindahan dapur dari SPPG Tawang Cikalang 2 ke SPPG Tawang Cikalang 3 yang dilakukan secara mendadak. Perubahan tersebut berdampak langsung pada keterlambatan distribusi makanan di SMPN 1 Kota Tasikmalaya. Selain persoalan ketepatan waktu, terdapat pula temuan mengenai kualitas menu yang kurang terjaga, seperti ditemukannya buah yang sudah tidak layak konsumsi. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem monitoring belum sepenuhnya mampu memastikan standar mutu layanan tetap terjaga, baik dari sisi ketepatan distribusi maupun kualitas makanan yang diterima sasaran program.⁴

Temuan di unit yang baru beroperasi seperti SPPG Tawang Cikalang 7 memperlihatkan bahwa kesiapan regulasi, koordinasi, dan komitmen pemerintah daerah masih memerlukan penguatan. Pelaksana di lapangan menghadapi kebingungan dalam menjalankan teknis program akibat

³ Hasil wawancara pada saat pra penelitian, dengan Pak Kasi sebagai lurah di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu, 6 Februari 2026.

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Dede Supriyatna sebagai koordinator MBG di SMPN 1 Kota Tasikmalaya, saat pra penelitian, 24 Februari 2026.

perubahan ketentuan operasional yang terjadi berulang dalam waktu relatif singkat. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian cepat, sementara kesiapan sumber daya pelaksana belum selalu sejalan dengan dinamika kebijakan yang ada. Di samping itu, proses pemenuhan persyaratan administratif, seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pada tahap awal masih dalam proses pengurusan dan membutuhkan dukungan lintas instansi, khususnya dinas kesehatan.⁵

Permasalahan dalam implementasi program tersebut, berpotensi memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program MBG pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai fondasi menuju visi “Generasi Emas 2045”. Apabila implementasi program di tingkat daerah tidak berjalan dengan baik, maka tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia juga sulit tercapai secara optimal. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan nasional di bidang pemenuhan gizi, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (JDIH, 2021). Permasalahan yang muncul dalam implementasi MBG di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa upaya tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi kebijakan.

⁵ Hasil wawancara pra penelitian, bersama Pak Ridwan sebagai asisten lapangan di SPPG Tawang Cikalang 7, 3 Februari 2026.

Implementasi program MBG secara nasional berada dalam koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN)⁶, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (JDIH, 2024). Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi program pemenuhan gizi masyarakat. Berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi program MBG di Kota Tasikmalaya justru menegaskan perlunya komitmen politik pemerintah daerah dalam mengoordinasikan aktor pelaksana, dan mengambil langkah cepat terhadap berbagai tantangan yang muncul, agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program MBG muncul dari janji kampanye Prabowo-Gibran, pada pemilihan presiden Indonesia 2024 yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting, melalui pemberian makanan bergizi kepada peserta didik, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 (Putra & Marsal, 2025). Namun, kajian tersebut lebih menekankan pada aspek politik hukum dan latar belakang kebijakan pada tingkat nasional, sehingga belum mengkaji secara mendalam *political will* pemerintah daerah dalam implementasi program.

⁶ BGN adalah lembaga pemerintah yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi dalam memperbaiki status gizi anak-anak di Indonesia dan mendukung upaya penurunan stunting. Dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kasus keracunan makanan, persoalan logistik distribusi, dan keterbatasan pendanaan (Rahayu, 2025). Namun, kajian tersebut masih membahas implementasi program MBG secara umum pada tingkat nasional, sehingga belum dikaji implementasi kebijakan MBG di tingkat daerah, khususnya berkaitan dengan *political will* pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program.

Penelitian lain menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran, fokus belajar, dan pemenuhan gizi peserta didik (Nurulaini & Afifah, 2025). Namun, kajian ini masih berfokus pada dampak program dan aspek implementasinya, sehingga terdapat kesenjangan untuk mengkaji *political will* pemerintah daerah khususnya terkait sikap, dukungan kebijakan, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam merespons implementasi program di tingkat lokal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan intervensi strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai masalah gizi buruk. Di Kota Tasikmalaya, kebijakan ini dihadapkan pada realitas empiris terkait fluktuasi angka stunting yang menjadi tolok ukur utama urgensi kebijakan publik. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya sempat

menyentuh angka 27,1% pada tahun 2023, sebelum mengalami penurunan bermakna menjadi 19,6% pada tahun 2024 (Dinkes, 2024).

Data pelaporan berbasis masyarakat (e-PPGBM) pada akhir tahun 2025 menunjukkan tantangan baru dengan adanya dinamika lonjakan kasus di tingkat akar rumput menjadi 12,61% akibat kendala intervensi gizi di lapangan (Dinkes, 2025). Kondisi fluktuatif ini menegaskan bahwa penanganan stunting di tingkat lokal bukan sekadar masalah teknis kesehatan, melainkan wujud manifestasi dari komitmen politik otoritas wilayah. Kegagalan penyelarasan antara program nasional seperti MBG dengan tata kelola birokrasi lokal mencerminkan sejauh mana *political will* Pemerintah Kota Tasikmalaya bergerak secara preventif, bukan sekadar responsif terhadap instruksi pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dan relevan untuk dilakukan, tidak hanya bertujuan untuk memahami kebijakan MBG sebagai program intervensi gizi, tetapi juga untuk menganalisis *political will* pemerintah daerah diwujudkan dalam proses perumusan, implementasi, dan pengendalian kebijakan di tengah tantangan implementasi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam analisis *political will* dan kebijakan publik dalam konteks pemerintahan lokal, sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam memahami arah, konsistensi, dan keberlanjutan kebijakan program MBG di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana *political will* Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *political will* Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, manfaat dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya dalam pengembangan konsep *political will* pada implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bentuk dukungan dan komitmen politik pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks politik lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi

empiris bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *political will*, implementasi kebijakan publik, dan dinamika pemerintahan daerah dalam sistem desentralisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap konsistensi dan efektivitas *political will* dalam implementasi kebijakan program MBG sebagai dasar perbaikan pengambilan keputusan, koordinasi antarperangkat daerah, dan akuntabilitas kebijakan.

1.4.2.2 Bagi lembaga pelaksana kebijakan, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai penerjemahan kebijakan MBG di tingkat daerah dan menjadi masukan bagi strategi pembinaan, pengawasan, meningkatkan koordinasi, dan penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika politik lokal.

1.4.2.3 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman kritis terhadap kebijakan publik sebagai hasil keputusan politik yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan sosial.

1.4.2.4 Bagi akademisi dan pengkaji Ilmu Politik, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam mengkaji hubungan antara kebijakan sosial, kekuasaan politik, dan implementasi kebijakan di tingkat lokal.